

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2020/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
**SUB UNIT KERJA** : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **WAWAN SETIADI,**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **749147**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 275.000.000

1. Bangunan Seluas 243 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG ,  
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HASIL  
SENDIRI Rp. 75.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 254.000.000

1. MOTOR, HONDA MATIC VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.  
10.000.000
2. MOTOR, HONDA MATIC VARIO 125CC Tahun 2016, HASIL  
SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO CVT MATIC Tahun 2007, HASIL SENDIRI  
Rp. 110.000.000
4. MOBIL, HONDA SUV / CRV Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.  
120.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 377.115.897**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 906.115.897**III. HUTANG** Rp. 164.103.374**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 742.012.523

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Agustus 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.